

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2013. Pelajaran Hukum Pidana Bag. I. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Sofyan dan Abdul Azis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media Group. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Education Yogyakarta. Yogyakarta.
- Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indoensia. Jakarta: Raih Asah Sukses.
- Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamza. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. Yogyakarta.
- Dedi Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan.
- , 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana: Jakarta.
- Gradien Mediatama. 2008. *Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik*. Transmedia Pustaka. Jakarta
- Harismukti, Makalah Hukum Pidana, disampaikan pada pelatihan hukum pidana dan kriminologi di Universitas Gajah Mada tanggal 23 – 27 Februari 2014.
- JCT Simorangkir dkk, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Paimin Napitupulu. 2004. *Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*. Desertasi Alumni. Bandung.

- Peter Salim dan Yenny Salim. 2004. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: Mandau Maju.
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI). Makassar
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni
- Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Undang – Undang dan Peraturan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu.

Sumber Internet :

(www.bawaslu.go.id/pdf). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 20.15 WITA.

(wikipedia.org). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 16.20 WITA.

(www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan/) diakses pada tanggal 07 Agustus 2020.

(ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20542/20151) surat sebagai alat bukti menurut kitab undang-undang hukum pidana, diakses pada tanggal 18 September 2020

(digilib.uinsby.ac.id/18288/6/Bab%202.pdf) tentang teori pembuktian diakses pada tanggal 18 September 2020